

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN EFEK DALAM PENAWARAN  
UMUM (OBLIGASI DIBANDINGKAN DENGAN KONSUMEN EFEK  
BERSIFAT UTANG DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS (MEDIUM  
TERM NOTES)**

**TUBAGUS DENI SUNARDI, S.H.**

**ABSTRAK**

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang berkesinambungan, tentunya setiap perusahaan membutuhkan modal dan pendanaan. Salah satu sumber pendanaan yang bisa digunakan oleh perusahaan adalah melalui penerbitan efek melalui penawaran umum sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pelaku usaha juga dapat mencari sumber pendanaan atau pembiayaan tidak melalui penawaran umum yang salah satu instrumennya biasa di sebut Medium Term Notes (MTN).

Adapun permasalahan yang di teliti dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah Otoritas Jasa Keuangan mengatur Penawaran Umum Terbatas (Obligasi) dan Penawaran Umum atas Efek yang Bersifat Utang? dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen efek yang melakukan pembelian efek melalui Penawaran Umum (Obligasi) dibandingkan dengan konsumen efek bersifat utang yang melakukan pembelian melalui Penawaran Umum Terbatas (Medium Term Notes)?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif yaitu penelitian dengan mengkaji aturan-aturan hukum terkait dibidang hukum pasar modal dan pendekatan perundang-undangan kemudian dianalisis hubungan aturan-aturan tersebut secara sistematis.

MTN sebelum terbitnya Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2019 merupakan perjanjian suatu utang atau bentuk pengakuan utang perusahaan penerbit kepada pemegang MTN yang dituangkan ke dalam bentuk surat atau akta yang tunduk pada ketentuan-ketentuan yang secara umum diatur dalam KUHPerduta dan juga tunduk ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Dimana dengan tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus, pada akhirnya tidak ada kewajiban pemeringkatan atas penerbitan MTN, tidak ada kewajiban dalam penyediaan pertanggungan/jaminan, dimana dengan tidak adanya kewajiban keterbukaan informasi, maka calon pembeli MTN juga tidak mengetahui secara pasti kondisi dari perusahaan yang menerbitkan MTN.

Hasil penelitian ini meunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur penawaran umum terbatas dan penawaran umum atas efek yang bersifat utang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan terkait lainnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen atau investor efek bersifat utang yang membeli melalui penawaran umum terbatas (MTN) dibandingkan dengan konsumen yang membeli melalui penawaran umum (obligasi) yang dalam hal ini di atur melalui Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2019.

**Kata Kunci : Medium Term Notes (MTN); Obligasi; Pasar Moda**

**PROTECTION OF SECURITIES CONSUMERS IN PUBLIC OFFERS  
(BONDS COMPARED WITH DEBT SECURITIES CONSUMERS IN  
LIMITED PUBLIC OFFERS (MEDIUM TERM NOTES))**

**TUBAGUS DENI SUNARDI, S.H.**

**ABSTRACT**

In implementing sustainable business activities, of course every company needs capital and funding. One source of funding that can be used by companies is through the issuance of securities through public offerings as regulated under Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market. Business actors can also look for sources of funding or financing not through public offerings, one of which is usually called Medium Term Notes (MTN).

As for the issues examined in writing this thesis, are how the Financial Services Authority regulates Limited Public Offering (Bonds) and Public Offering of Debt Securities? and how is the legal protection for securities consumers who purchase securities through a Public Offering (Bonds) compared to debt securities consumers who purchase through a Limited Public Offering (Medium Term Notes)?

This research was conducted using the juridical-normative method, namely research by examining the related legal rules in the field of capital market law and the statutory approach and then analyzing the relationship between these rules systematically.

MTN prior to the issuance of OJK Regulation Number 30 / POJK.04 / 2019 is a debt agreement or a form of debt recognition of the issuing company to MTN holders which is written in the form of a letter or deed which is subject to the provisions generally regulated in the Civil Code and is also subject to the provisions - provisions in the Code of Commercial Law (KUHD). Where in the absence of regulations that specifically regulate, in the end there is no obligation to rank MTN issuance, there is no obligation to provide coverage / guarantees, where in the absence of information disclosure obligations, prospective MTN buyers also do not know with certainty the conditions of the company issuing MTN.

The results of this study indicate that the Financial Services Authority has regulated a limited public offering and a public offering for debt securities is regulated based on Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and other related regulations. Legal protection for consumers or debt securities investors who buy through a limited public offering (MTN) compared to consumers who buy through a public offering (bonds) which in this case is regulated through OJK Regulation Number 30 / POJK.04 / 2019.

**Keywords: Medium Term Notes (MTN); Bond; Capital Market**